



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 99,88%

Jumlah	42 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 29 PEREMPUAN : 13
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 20 SMU : 16 S2 : 6 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5 SWASTA : 0 TNI : 0 WIRUSAHA : 0 POLRI : 15 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 22

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3,976
2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,976
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Pengguna layanan PTSP Pengadilan Negeri Koba setelah diberikan billing PNBP oleh petugas bisa membayar sendiri baik melalui mesin EDC yang ada di Pengadilan maupun melalui badan-badan lain seperti kantor pos.

Gedung Pengadilan Negeri Koba telah dilengkapi dengan CCTV di berbagai tempat dan Para Pimpinan Pengadilan Negeri Koba tak henti-hentinya dalam setiap rapat untuk selalu mengingatkan agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Koba termasuk juga para honorer untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti percaloan dalam pengurusan layanan.

Petugas PTSP PN Koba dalam melaksanakan pemberian layanan kepada pengguna layanan PTSP telah dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), juga setiap hari diadakan briefing PTSP oleh Supervisor dan Hakim Pengawas PTSP untuk mengetahui dan membahas jika ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan, sehingga dengan demikian diharapkan pelayanan oleh petugas PTSP sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan PTSP.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

KETUA PENGADILAN NEGERI KOB



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.